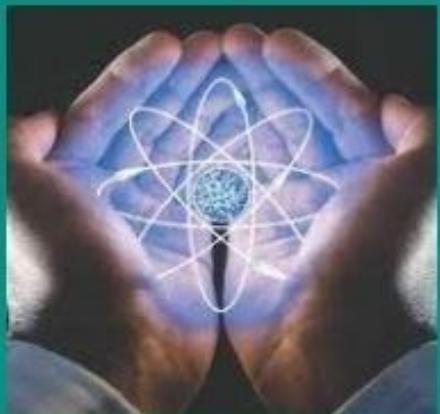


Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team.....	4
Article information	5
Check this article update (crossmark).....	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

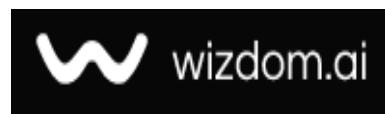
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Simplified Audits Support Micro Small And Medium Enterprise Financial Governance: Audit Sederhana Mendukung Tata Kelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Naning Rahmawati, naningrahmawati02@gmail.com (1)

Program Studi S2 Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: Micro, Small, and Medium Enterprises contribute 61.07% to Indonesia's GDP and absorb 97% of the national workforce, yet 77.5% still lack adequate financial reporting. **Specific Background:** Most micro, small, and medium enterprises rely on manual or inconsistent bookkeeping, have limited understanding of financial standards, and experience obstacles in accessing financing due to unreliable financial statements. **Knowledge Gap:** Previous studies highlight financial literacy and reporting issues, but limited research explains how simplified audits aligned with national financial standards function as a practical mechanism for supporting financial governance. **Aims:** This literature review from 2022–2024 analyzes the urgency, mechanisms, and outcomes of simplified audits in strengthening financial management for micro, small, and medium enterprises in Indonesia. **Results:** Findings show simplified audits detect accounting errors, increase transparency, strengthen tax compliance, expand financing opportunities, reduce operational inefficiencies, and clarify real business conditions through digital tools that support audit trails and systematic documentation. **Novelty:** This study positions simplified audits as a transitional governance instrument that bridges financial illiteracy, the application of national financial standards, and the digitalization of enterprise administration, with processes adapted to the scale and constraints of small business operations. **Implications:** The study indicates that policy support, digital adoption, capacity building, and affordable audit services can enable long-term financial resilience, transparency, and competitiveness for micro, small, and medium enterprises in Indonesia's economic landscape.

Highlights:

- Routine verification identifies misstatements, tax exposure, and hidden cash flow discrepancies.
- Digital accounting tools streamline documentation and strengthen audit traceability.
- Audit stages offer a practical pathway for applying national financial reporting standards.

Keywords: Simple Audit; Micro Small And Medium Enterprise; SAK EMKM; Financial Health; Digital Accounting

Published date: 2026-01-07

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,07%, setara dengan Rp8.573,89 triliun, dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Yolanda, 2024). Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 66 juta unit, meningkat 1,5% dibandingkan tahun 2022, yang menunjukkan kontribusi luar biasa terhadap struktur ekonomi Indonesia [1].

Meskipun kontribusinya sangat besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek manajemen keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi UMKM adalah ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan yang memadai. Sebagian besar pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan berbasis kas yang sederhana, bahkan sebagian lainnya belum melakukan pencatatan sama sekali [2]. Data menunjukkan bahwa 77,5% UMKM tidak memiliki laporan keuangan, sementara hanya 22,5% UMKM yang memiliki laporan keuangan [3].

Kondisi ini mengakibatkan UMKM kesulitan dalam memantau kondisi keuangan usahanya, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Banyak UMKM yang menganggap pembukuan keuangan sebagai suatu kegiatan usaha tidak terlalu penting, pelaku usaha hanya berfokus kepada marketing dan pengembangan produk [3]. Padahal, dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar, pengusaha kecil menengah dapat mengontrol biaya operasional bisnis, mengetahui laba rugi usaha, mengetahui hutang piutang dan memperhitungkan pajak.

Audit sederhana menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan prosedur yang lebih praktis dan terjangkau dibanding audit formal, namun tetap mampu memastikan ketepatan dan keandalan laporan keuangan. Audit ini tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol internal untuk menjaga kesehatan keuangan UMKM [4].

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya audit sederhana bagi UMKM dalam menjaga kesehatan usaha, mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh, serta memberikan rekomendasi implementasi yang sesuai dengan karakteristik UMKM di Indonesia. Dengan memahami pentingnya audit sederhana diharapkan pelaku UMKM dapat lebih termotivasi untuk menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep UMKM di Indonesia

UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut undang-

undang tersebut, usaha mikro memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000 dan Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp300.000.000 dan Rp2.500.000.000. Usaha menengah memiliki kekayaan bersi Rp500.000.000. hingga Rp10.000.000.000 atau omzet Rp2.500.000.000 sampai Rp50.000.000 (UU No. 20 Tahun 2008). UMKM ditandai oleh struktir sederhana, modal terbatas, dan pengelolaan informal, tetapi tetap unggul karena fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan bisnis. Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan tren positif, terutama setelah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, sebanyak 22 juta UMKM telah bergabung dalam ekonomi digital, atau sebesar 33,6% dari total UMKM [5]. Pemerintah Indonesia menargetkan 30 juta UMKM digital pada tahun 2024 sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital nasional [6].

B. Pengelolaan Keuangan UMKM

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan UMKM. Kuswadi (2005) mengidentifikasi empat indikator pengelolaan keuangan yang efektif, yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian [7]. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM belum menerapkan keempat indikator tersebut secara optimal. Dari penelitian di wisata Pasar Bambu Desa Bonjeruk, ditemukan bahwa dari 17 UMKM yang diteliti, hanya 11 UMKM yang membuat perencanaan anggaran, 12 UMKM yang membuat pencatatan, dan 9 UMKM yang membuat laporan usaha serta melakukan pengendalian [8].

Oktaviani dan Herawaty (2022) dalam laporannya menyatakan bahwa sebagian besar UMKM hanya membuat laporan keuangan sederhana yang sebatas memperlihatkan laba atau rugi kegiatan usaha [2]. Pencatatan yang tidak runtun dan tidak terdokumentasi dengan baik menjadi kendala utama dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Pencatatan keuangan manual yang dilakukan UMKM rentan mengalami penyimpangan data akibat kesalahan manusia, seperti hilangnya bukti transaksi dan kesalahan transposisi angka.

Kondisi serupa dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan (2024) yang menyatakan bahwa 77,5% UMKM tidak memiliki laporan keuangan, sementara hanya 22,5% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Banyak UMKM yang menganggap pembukuan keuangan sebagai suatu kegiatan usaha tidak terlalu penting, pelaku usaha hanya berfokus kepada marketing dan pengembangan produk. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan mengenai pentingnya audit dalam pengelolaan keuangan UMKM.

C. Standar Akuntansi Keuangan untuk UMKM (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi yang disederhanakan khusus untuk UMKM. SAK EMKM disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif mulai 1

Januari 2018. SAK EMKM merupakan standar yang berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dan karakteristik dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM [9].

SAK EMKM dirancang dengan tujuan memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh UMKM dengan basis penilaian harga historis. Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya [9].

Komponen laporan keuangan menurut SAK EMKM meliputi: (1) Laporan Posisi Keuangan, yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan; (2) Laporan Laba Rugi, yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode; dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan [10]. Kesederhanaan SAK EMKM membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan akuntansi.

Keberadaan SAK EMKM diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara komprehensif, sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan yang berbeda-beda dan menyusun laporan keuangan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis [10].

D. Konsep Audit Sederhana untuk UMKM

Audit sederhana merupakan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku, dalam hal ini SAK EMKM. Audit laporan keuangan hadir sebagai solusi untuk memastikan angka-angka dalam laporan benar, transparan, dan sesuai standar akuntansi [4]. Berbeda dengan audit formal yang komprehensif, audit sederhana untuk UMKM lebih focus pada aspek-aspek kritis yang berkaitan langsung dengan kesehatan keuangan usaha.

Proses audit sederhana meliputi beberapa tahapan utama. Pertama, auditor memahami model bisnis, proses operasional, sumber pendapatan, dan kendala pernah dialami. Kedua, pengumpulan dokumen dasar seperti laporan laba rugi, neraca, buku kas, mutasi bank, bukti transaksi, daftar persediaan, serta dokumen pajak. Ketiga, proses audit meliputi rekonsiliasi bank, pengujian transaksi, pengecekan akun, dan analisis keuangan untuk melihat potensi salah saji. Keempat, auditor memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi khusus UMKM (SAK EMKM). Kelima, auditor menyusun opini audit, temuan, dan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan oleh pemilik UMKM [4].

Audit sederhana penting bagi UMKM karena membantu menemukan kesalahan pencatatan yang masih banyak terjadi akibat penggunaan sistem manual atau kurang terdokumentasi. Hasil audit juga

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, sehingga mempermudah akses pinjaman dan menarik investor. Selain itu audit memastikan UMKM patuh terhadap kewajiban perpajakan. Keempat, audit mengungkap kondisi finansial riil bisnis, termasuk potensi kebocoran kas dan pemborosan biaya. Kelima, rekomendasi auditor membantu UMKM lebih efisien dan hemat biaya [4].

E. Sistem Informasi Akuntansi dan Audit UMKM

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong adopsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di kalangan UMKM. Banyak perusahaan mengakui pentingnya SIA dalam menjaga keakuratan dan integritas data keuangan mereka. Di Indonesia, adopsi SIA didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat serta meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan [2].

Perusahaan-perusahaan menggunakan SIA untuk memudahkan proses pelaporan keuangan, memantai kinerja keuangan secara real-time, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntasi yang berlaku. Dengan adanya SIA, proses audit internal dan eksternal menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan [12].

Penggunaan aplikasi akuntansi digital memudahkan pencatatan transaksi secara sistematis dan real-time. Data yang tercatat secara digital lebih mudah diaudit karena memiliki fitur-fitur seperti audit trail yang memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri kembali. Aplikasi akuntansi juga dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis sesuai dengan format SAK EMKM, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan akurasi laporan.

Metode

Artikel ini merupakan studi literatur (literature review) yang menganalisis berbagai publikasi ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan sumber resmi pemerintah terkait audit sederhana dan pengelolaan keuangan UMKM. Sumber data berasal dari publikasi periode 2022-2024 yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan dari berbagai literatur guna membangun pemahaman komprehensif tentang pentingnya audit sederhana bagi UMKM [13].

Kriteria inklusi literature mencakup: (1) publikasi terbit antara 2022-2024; (2) penelitian berfokus pada UMKM di Indonesia; (3) membahas pengelolaan keuangan; (4) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris; (5) dapat diakses melalui jurnal akreditasi, repository institusi, atau situs pemerintah. Analisis dilakukan dengan menelusuri tema, membandingkan temuan studi, dan merumuskan kerangka konspektual penerapan audit sederhana bagi UMKM.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi: jurnal ilmiah terakreditasi nasional, publikasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, standar yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta laporan pengabdian masyarakat dari universitas terkemuka di Indonesia.

Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan tahapan: (1) identifikasi literatur relevan; (2) ekstraksi data dan informasi kunci; (3) kategorisasi temuan berdasarkan tema; (4) analisis komparatif antar sumber; dan (5) sintesis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi [14].

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Pengelolaan Keuangan UMKM Saat Ini

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia masih jauh dari ideal. Data dari Kementerian Keuangan (2024) mengungkapkan bahwa 77,5% UMKM tidak memiliki laporan keuangan, sementara hanya 22,5% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan dan mengembangkan usahanya.

Penelitian Ningsih et al. (2023) di wisata Pasar Bambu Desa Bonjeruk menemukan bahwa dari 17 UMKM yang diteliti, hanya 11 UMKM yang membuat perencanaan anggaran (64,7%), 12 UMKM yang membuat pencatatan (70,6%), dan hanya 9 UMKM yang membuat laporan usaha serta melakukan pengendalian (52,9%). Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya praktik pengelolaan keuangan meliputi keterbatasan pengetahuan, kurangnya kesadaran, dan kurangnya kepedulian terhadap pentingnya manajemen keuangan.

Oktaviani dan Herawaty (2022) menegaskan bahwa sebagian besar UMKM hanya membuat laporan keuangan sederhana yang sebatas memperlihatkan laba atau rugi kegiatan usaha [2]. Pencatatan keuangan manual yang dilakukan UMKM rentan mengalami penyimpangan data akibat kesalahan manusia, seperti hilangnya bukti transaksi dan kesalahan transposisi angka. Ketika diberi pelatihan proses penyusunan jurnal sebagai tahap awal membuat laporan keuangan berdasarkan akuntansi, masih terdapat kesalahan, yaitu salah dalam menganalisis transaksi.

Banyak UMKM lebih focus pada operasional sehingga laporan keuangan terabaikan. Ketidakakuratan laporan dapat menghambat akses pinjaman, memperlambat perkembangan usaha, dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak. Karena itu, audit sederhana diperlukan untuk memperbaiki pencatatan dan pelaporan keuangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya pencatatan keuangan merupakan masalah yang terjadi secara nasional di berbagai sector UMKM.

Konsistensi hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa lemahnya literasi keuangan dan minimnya penggunaan standar akuntansi merupakan penyebab utama UMKM sulit naik kelas dan mengakses pembiayaan formal. Oleh karena itu, audit sederhana menjadi relevan sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas pencatatan dan meningkatkan akuntabilitas usaha.

B. Pemahaman dan Penerapan SAK EMKM pada UMKM

Meskipun SAK EMKM telah diberlakukan sejak 1 Januari 2018, tingkat pemahaman dan penerapannya di kalangan UMKM masih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku

UMKM terhadap SAK EMKM masih kurang karena pemahaman akuntansi dan juga sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah dan lembaga yang membawahi UMKM masih belum maksimal [10].

Studi kasus pada UMKM PT. Capture Data Teknologi menunjukkan bahwa meskipun pihak UMKM sudah mengetahui informasi terbitnya pencatatan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, mereka masih belum memahami alur pencatatannya [11]. Banyaknya kesulitan yang dialami UMKM dalam menyusun laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya keterampilan para pelaku UMKM dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa beberapa UMKM belum menerapkan SAK EMKM pada pelaporan keuangannya. Alasan tidak diterapkannya SAK EMKM adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan usaha berdasarkan SAK EMKM [11]. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM.

Namun, setelah mendapatkan pelatihan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, pelaku UMKM dapat memahami jenis-jenis laporan keuangan yang mesti dibuat, konsep dan praktik pembuatan laporan keuangan [2]. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan mereka.

Secara keseluruhan temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kompleksitas SAK EMKM, tetapi pada minimnya bimbingan teknis dan belum adanya kebiasaan pencatatan yang konsisten di kalangan pelaku UMKM. Dengan demikian, implementasi audit sederhana berpotensi menjadi jembatan yang membantu UMKM memahami sekaligus menerapkan SAK EMKM secara bertahap melalui proses pengecekan rutin dan perbaikan berkelanjutan.

C. Tantangan Implementasi Audit pada UMKM

Implementasi audit pada UMKM menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan literatur, terdapat beberapa kendala utama yang paling signifikan.

1. Persepsi Kompleksitas dan Beban Biaya

Banyak pelaku UMKM menganggap audit sebagai proses yang rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya besar. Persepsi ini umumnya dipicu oleh minimnya pemahaman tentang audit sederhana yang dapat disesuaikan dengan skala usaha. Bagi UMKM dengan keterbatasan modal, penggunaan auditor eksternal dipandang sebagai beban. Padahal, laporan audit sering menjadi syarat untuk akses pembiayaan, kepatuhan pajak, serta peningkatan kredibilitas usaha [4].

2. Keterbatasan Dokumentasi dan Pencatatan Keuangan

Kelengkapan bukti transaksi masih menjadi tantangan terbesar dalam proses audit UMKM. Pencatatan yang tidak terstruktur, berbasis ingatan, atau tercampur dengan keuangan pribadi menyebabkan laporan keuangan tidak akurat. Kondisi ini memperlambat proses audit dan meningkatkan risiko kesalahan dalam penyajian laporan [4].

3. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Audit

Fokus UMKM yang lebih menitikberatkan pada operasional harian membuat laporan keuangan dan audit sering diabaikan. Minimnya kesadaran mengenai dampak laporan yang tidak akurat—seperti hambatan pengajuan pinjaman, risiko denda pajak, dan rendahnya kredibilitas menyebabkan audit tidak diprioritaskan sebagai bagian dari tata kelola usaha [4].

4. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sebagian besar UMKM tidak memiliki tenaga dengan kompetensi akuntansi maupun pemahaman audit yang memadai. Keterbatasan ini berdampak pada ketidaksiapan dalam menyiapkan dokumen audit dan pelaksanaan audit internal sederhana sekalipun.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait budaya pencatatan, literasi keuangan, serta persepsi pelaku UMKM terhadap pentingnya audit. Penyederhanaan fokus pada hambatan-hambatan kunci ini memudahkan identifikasi solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

D. Manfaat Audit Sederhana bagi UMKM

Meskipun implementasi audit menghadapi berbagai tantangan, manfaat yang diperoleh UMKM dari audit sederhana sangat signifikan dan dapat mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

1. Mendeteksi Kesalahan dan Meningkatkan Akurasi

Audit sederhana membantu menemukan kesalahan pencatatan yang sering terjadi akibat pencatatan manual atau penggunaan aplikasi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kesalahan-kesalahan ini, meskipun tampak kecil, dapat berdampak besar terhadap pengambilan keputusan bisnis [4]. Dengan adanya SIA, proses audit internal dan eksternal menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan [12].

Audit membantu memastikan bahwa data keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah akurat dan dapat diandalkan. Proses audit meliputi rekonsiliasi bank, pengujian transaksi, pengecekan akun, dan analisis keuangan untuk melihat potensi salah saji, sehingga memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan benar.

2. Meningkatkan Kredibilitas dan Akses Pembiayaan

Laporan keuangan hasil audit meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan, investor, dan pihak eksternal lainnya. Banyak instansi dan lembaga keuangan hanya menerima laporan yang sudah diaudit sebagai persyaratan pengajuan pinjaman atau tender. Laporan audited menjadi bukti kredibilitas bisnis, sehingga peluang lolos pengajuan pinjaman atau mendapatkan investor menjadi lebih besar [4].

Keberadaan SAK EMKM dan audit yang sesuai standar membantu pemangku kepentingan UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara komprehensif, sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan yang berbeda-beda [10]. Dengan demikian, audit menjadi jembatan bagi UMKM untuk meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan formal.

3. Memastikan Kepatuhan Perpajakan

Banyak UMKM yang tidak memahami kewajiban pajak secara menyeluruh. Audit membantu memastikan tidak ada kesalahan yang berpotensi menimbulkan denda atau sanksi perpajakan. Audit juga membantu memastikan kepatuhan pajak agar tidak menimbulkan risiko denda [4].

Auditor dapat mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi terhadap ketidakpatuhan pajak dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum terjadi masalah. Dengan demikian, audit berperan sebagai preventif terhadap masalah perpajakan yang dapat merugikan UMKM.

4. Mengungkap Kondisi Finansial Riil

Audit mengungkap kondisi finansial riil bisnis, termasuk potensi kebocoran kas, ketidaktepatan pencatatan, dan pemborosan biaya yang sebelumnya tidak disadari. Rekomendasi auditor membantu UMKM lebih efisien dan hemat biaya dalam operasional sehari-hari. Audit sering menemukan kebocoran kecil yang jika dibiarkan dapat menumpuk menjadi kerugian yang signifikan [4].

Auditor menjelaskan kondisi keuangan aktual bisnis, potensi risiko, dan strategi peningkatan yang perlu dilakukan. Informasi ini sangat berharga bagi manajemen UMKM untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan.

5. Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis

Dengan informasi keuangan yang akurat dan teraudit, manajemen UMKM dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik. Laporan keuangan bagi UMKM memberikan informasi penting yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Selain itu, laporan ini juga memberi gambaran tentang posisi keuangan dan kinerja UMKM sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis [10]. Analisis terhadap laporan keuangan hasil audit dapat memberikan wawasan tentang kinerja usaha, area yang perlu perbaikan, dan peluang pengembangan usaha. Hal ini mendukung UMKM dalam merencanakan strategi pengembangan usaha yang lebih terarah dan berbasis data yang valid.

6. Membangun Sistem Pengendalian Internal

Proses audit membantu UMKM membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik. Auditor tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur, meningkatkan dokumentasi, dan mengimplementasikan kontrol yang sesuai dengan skala usaha. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, risiko kesalahan dan kecurangan dapat diminimalkan [12].

Sistem informasi akuntansi yang baik dengan fitur audit trail memperkuat pengendalian internal dan memudahkan proses audit di masa mendatang. Setiap transaksi yang dicatat dapat ditelusuri kembali, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat terjaga dengan baik.

E. Peran Teknologi dalam Memfasilitasi Audit Sederhana

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk memfasilitasi audit sederhana dengan lebih efisien dan efektif. Banyak perusahaan mengakui pentingnya SIA dalam menjaga keakuratan dan integritas data keuangan mereka [12]. Di Indonesia, adopsi SIA didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat serta meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Perusahaan-perusahaan menggunakan SIA untuk memudahkan proses pelaporan keuangan, memantau kinerja keuangan secara real-time, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Dengan adanya SIA, proses audit internal dan eksternal menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan [12].

Penggunaan aplikasi akuntansi digital memudahkan pencatatan transaksi secara sistematis dan real-time. Data yang tercatat secara digital lebih mudah diaudit karena memiliki fitur-fitur seperti audit trail yang memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri kembali. Aplikasi akuntansi juga dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis sesuai dengan format SAK EMKM, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan akurasi laporan.

Pemerintah Indonesia menargetkan 30 Juta UMKM digital pada tahun 2024 sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital nasional [6]. Digitalisasi ini tidak hanya mencakup aspek pemasaran, tetapi juga pengelolaan keuangan termasuk implementasi sistem akuntansi digital yang memudahkan proses audit.

Namun, adopsi teknologi ini perlu didukung dengan peningkatan literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi akuntansi menjadi kunci sukses digitalisasi. Pemerintah dan institusi terkait dapat berperan dalam menyediakan program pelatihan dan subsidi untuk aplikasi akuntansi bagi UMKM.

F. Implementasi Audit Sederhana untuk UMKM

Berdasarkan analisis literatur, implementasi audit sederhana untuk UMKM dapat dilakukan melalui pendekatan bertahap yang mempertimbangkan karakteristik dan keterbatasan UMKM.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi pemahaman terhadap model bisnis UMKM, proses operasional, sumber pendapatan, dan kendala yang dihadapi. Auditor perlu memahami konteks usaha untuk dapat memberikan penilaian yang relevan dan rekomendasi yang aplikatif. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan dokumen dasar seperti laporan laba rugi, neraca, buku kas, mutasi bank, bukti transaksi, daftar persediaan, dan dokumen pajak [4].

Pemahaman bisnis ini penting karena setiap UMKM memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada jenis usaha, skala operasi, dan kompleksitas transaksi. Auditor perlu menyesuaikan pendekatan audit dengan kondisi spesifik UMKM tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Audit

Tahap pelaksanaan audit meliputi beberapa prosedur utama:

- a. Rekonsiliasi Bank: Mencocokkan catatan kas dengan mutasi bank untuk memastikan tidak ada perbedaan yang tidak dapat dijelaskan. Ini merupakan prosedur dasar yang sangat penting untuk mendeteksi kesalahan pencatatan kas dan transaksi bank.
- b. Pengujian Transaksi: Melakukan sampling terhadap transaksi-transaksi utama untuk memverifikasi keakuratannya. Auditor meninjau bukti transaksi untuk memastikan pencatatan dilakukan secara tepat.
- c. Pengecekan Akun: pemeriksaan saldo akun penting, seperti piutang, utang, persediaan, dan aset tetap dilakukan untuk memastikan nilai yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Analisis keuangan: analisis rasio dan tren digunakan untuk mendeteksi anomaly atau area yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga potensi masalah yang tidak tampak dari pemeriksaan dokumen yang teridentifikasi.
- e. Auditor memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK EMKM, yang menjadi standar akuntansi khusus untuk UMKM [9]. Proses audit juga meliputi penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan meliputi penyusunan opini audit, temuan, dan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan oleh pemilik UMKM. Laporan audit harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM yang mungkin tidak memiliki latar belakang akuntansi. Auditor menjelaskan kondisi keuangan aktual bisnis, potensi risiko, dan strategi peningkatan yang perlu dilakukan [4].

Laporan audit sebaiknya mencakup: (1) Opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan; (2) Temuan-temuan penting selama proses audit; (3) Rekomendasi perbaikan yang praktis dan dapat diimplementasikan; (4) Identifikasi area-area risiko tinggi; dan (5) Saran untuk peningkatan sistem pengendalian internal.

4. Tahap Tindak Lanjut

Setelah audit selesai, UMKM perlu mendaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Auditor dapat mendampingi penerapan perbaikan dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pendampingan ini penting karena perubahan system membutuhkan waktu, sehingga UMKM lebih mudah menerapkan rekomendasi dan memperkuat pengelolaan keuangannya.

G. Rekomendasi Kebijakan dan Praktik

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk mendorong implementasi audit sederhana pada UMKM:

1. Peningkatan Literasi Keuangan dan Akuntansi

Pemerintah, institusi pendidikan, dan asosiasi profesi perlu meningkatkan program edukasi dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan dan pentingnya audit bagi UMKM. Sosialisasi SAK EMKM perlu diperluas agar lebih banyak UMKM yang memahami dan menerapkannya. Program pelatihan harus dirancang dengan pendekatan praktis dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM [2].

2. Penyediaan Jasa Audit yang Terjangkau

Kantor Akuntan Publik (KAP) dan konsultan keuangan dapat menyediakan paket audit sederhana dengan biaya yang terjangkau khusus untuk UMKM. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif bagi UMKM yang melakukan audit untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Skema kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi dapat dikembangkan untuk menyediakan jasa audit dengan biaya terjangkau.

3. Integrasi Audit dalam Persyaratan Pembiayaan

Lembaga keuangan dapat menjadikan laporan keuangan teraudit sebagai salah satu persyaratan pembiayaan, namun dengan menyediakan fasilitasi atau referensi auditor yang dapat melakukan audit dengan biaya terjangkau. Hal ini akan mendorong UMKM untuk melakukan audit secara rutin dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

4. Digitalisasi dan Otomatisasi

Mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi akuntansi digital yang memudahkan pencatatan dan audit. Pemerintah dapat menyediakan platform atau aplikasi akuntansi gratis atau bersubsidi yang

sesuai dengan kebutuhan UMKM dan mengacu pada SAK EMKM. Target 30 juta UMKM digital pada tahun 2024 harus mencakup aspek digitalisasi pengelolaan keuangan [6].

5. Pendampingan Berkelanjutan

Selain audit, UMKM memerlukan pendampingan berkelanjutan dalam implementasi rekomendasi audit dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Program pendampingan dapat dilakukan oleh universitas, lembaga pelatihan, atau konsultan melalui program pengabdian masyarakat. Model pendampingan yang telah terbukti efektif, seperti yang dilakukan oleh Andayani et al. (2024) dan Oktaviani & Herawaty (2022), dapat direplikasi di berbagai wilayah [2], [11].

6. Pengembangan Standar Audit Khusus UMKM

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan regulator terkait dapat mengembangkan panduan audit khusus untuk UMKM yang lebih sederhana namun tetap memenuhi standar profesional. Panduan ini dapat membantu auditor dalam melakukan audit UMKM dengan lebih efisien dan efektif, serta membantu UMKM memahami proses audit dengan lebih baik [15].

Simpulan

Audit sederhana merupakan instrumen penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan UMKM. Temuan kajian menunjukkan bahwa audit sederhana memberikan manfaat signifikan, antara lain mendeteksi kesalahan pencatatan, meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas peluang akses pembiayaan, memastikan kepatuhan perpajakan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Tantangan implementasi yang masih dihadapi UMKM meliputi keterbatasan sumber daya, minimnya dokumentasi, rendahnya pemahaman akuntansi, serta persepsi bahwa audit merupakan proses yang rumit. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan literasi dan pendampingan yang lebih sistematis bagi pelaku UMKM.

Penerapan audit sederhana yang sesuai SAK EMKM dan didukung teknologi digital menjadi langkah strategisnya untuk meningkatkan efisiensi proses audit. Digitalisasi melalui aplikasi pembukuan sistem informasi akuntansi, dan platform audit cloud dapat mengurangi beban administrasi dan mempermudah verifikasi data.

Dukungan pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan asosiasi profesi diperlukan agar UMKM memperoleh pelatihan pelatihan, pendampingan, dan layanan audit terjangkau. Hasil penelitian menegaskan bahwa audit sederhana tidak hanya meningkatkan kualitas pencatatan, tetapi juga memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Karena itu, peningkatan kualitas audit sederhana merupakan investasi penting bagi keberlanjutan IMKM. Penelitian berikutnya disarankan mengembangkan model audit berbasis teknologi yang lebih otomatis dan adaptif, menilai efektivitasnya pada berbagai jenis usaha, serta mengkaji pengaruhnya terhadap akses pembiayaan dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, pengembangan kerangka kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memperluas implementasi audit sederhana secara lebih terstruktur. Dengan demikian, audit sederhana tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan, tetapi juga sebagai fondasi transformasi manajemen keuangan UMKM menuju sektor usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, infomasi, serta saran selama proses penyusunan artikel ini. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan dan keberlangsungan usaha.

Referensi

- [1] D. R. Hapsari, T. Anindita, and N. Anggraini, “Strategi keberlanjutan UMKM di Indonesia melalui literasi digital dan kewirausahaan sosial,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, pp. 234–245, 2024.
- [2] R. Oktaviani and V. Herawaty, “Pengaruh pengelolaan keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” *Jurnal Akuntansi Trisakti*, vol. 9, no. 1, pp. 101–116, 2022.
- [3] Kementerian Keuangan, Strategi peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui perbaikan tata kelola keuangan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2024.
- [4] YNR, “Kenapa audit laporan keuangan penting bagi bisnis UMKM dan startup?” Yos & Rekan Konsultan Pajak, 2024.
- [5] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah terus dorong peningkatan UMKM naik kelas melalui program PEN, 2023.
- [6] M. Matheus and W. Gunadi, “Transformasi digital UMKM Indonesia: Peluang dan tantangan menuju ekonomi digital 2024,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 12, no. 1, pp. 78–92, 2024.
- [7] Kuswadi, Meningkatkan laba melalui pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- [8] N. W. Ningsih, H. Hartini, and I. W. Subagia, “Analisis pengelolaan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wisata Pasar Bambu Desa Bonjeruk,” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, vol. 8, no. 1, pp. 145–158, 2023.
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018.
- [10] I. W. H. Mustika and R. Ferdila, “Implementasi SAK EMKM dan dampaknya terhadap akses pembiayaan UMKM,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 13, no. 2, pp. 301–315, 2022.

- [11] P. Y. S. Andayani, N. T. Herawati, and I. P. Julianto, "Pendampingan penerapan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM PT. Capture Data Teknologi," *Community Services Journal (CSJ)*, vol. 6, no. 2, pp. 450–460, 2024.
- [12] H. Hermansyah, I. Safitri, and A. Rahman, "Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol. 24, no. 1, pp. 112–125, 2024.
- [13] L. Hidayati, "Analisis biaya kualitas produk dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan kepercayaan konsumen UMKM di Simo Sudomulyo," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, pp. 9–12, 2023.
- [14] N. Ihsan and N. Nurrohim, "Manfaat penggunaan sistem audit secara mandiri dalam rangka peningkatan kualitas dan keberlangsungan UMKM," *Jurnal Global Manajemen*, vol. 13, no. 1, pp. 124–131, 2024.
- [15] O. Octavia, V. Aurelia, and S. Supriyanto, "Pentingnya peran audit dalam laporan keuangan UMKM," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, vol. 1, no. 4, pp. 1115–1120, 2022.